

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah ekonomi di hampir setiap negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di sekitarnya. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup yang digunakan. Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan dari tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh untuk dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang masyarakat capai dan bisa dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat (Sutikno et al., 2019).

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering menjadi masalah dalam suatu daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan sebuah rantai kemiskinan. Ada beberapa pendapat tentang kemiskinan, salah satunya adalah bahwa kemiskinan dikaitkan dengan kekurangan materi, karena rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial, sehingga seseorang yang termasuk dalam kelompok miskin tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kurangnya penghasilan. Ada dua definisi: yang sederhana dan yang umum. Pertama, kemiskinan absolut yaitu seseorang yang hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Kedua, kemiskinan relatif adalah seseorang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya (P. Kemiskinan et al., 2018). Menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2023), Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,36 persen, mengalami

penurunan sebesar 0,21 persen poin dibandingkan dengan September 2022 dan menurun 0,18 persen poin dibandingkan dengan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada periode tersebut mencapai 25,90 juta orang, berkurang sebanyak 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022 dan berkurang 0,26 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022.

Pada tingkat perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 adalah 7,29 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan pada September 2022 sebesar 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, namun mengalami penurunan pada bulan September 2022 sebesar 12,36 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 menurun sebanyak 0,24 juta orang, dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang. Sedangkan di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 0,22 juta orang, dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar Rp.550.458 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, komponen Garis Kemiskinan Makanan mencapai Rp.408.522 (74,21 persen), sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan tercatat sebesar Rp.141.936 (25,79 persen) (Badan Pusat Statistik Indonesia 2023).

Penduduk miskin yang ada di masing-masing daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia termasuk di kota Cirebon dapat di bilang cukup besar. Kota Cirebon termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang padat terutama di wilayah perkotaan. Kota Cirebon menempati posisi ke-5 dari 10 daerah di Jawa Barat dengan angka kemiskinan tertinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk yang berasal dari luar Kota Cirebon telah tinggal di sini dengan niat untuk mencari pekerjaan, tetapi hal ini tidak mudah karena masih ada sedikit lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak orang belum memiliki pekerjaan, yang mengakibatkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang berdampak langsung pada kemiskinan. (Kolinug et al., 2019). Hal ini dapat di lihat pada

penjelasan Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1. Grafik Urutan Angka Kemiskinan Di Jawa Barat
Sumber: Inilah.com

Pada grafik 1.1. Persentase penduduk miskin di Kota Cirebon tercatat sebesar 8,00%. Kota Cirebon menempati peringkat kelima dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di daerah ini cukup mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Peringkat ini menempatkan Kota Cirebon lebih tinggi dibandingkan daerah Bandung Barat dan Tasikmalaya, namun lebih rendah dibandingkan Kota Tasikmalaya dan Majalengka.

Hal ini penting untuk memahami dinamika sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Karena Kota Cirebon masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif dalam menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki akses terhadap layanan dasar di wilayah tersebut. Kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi, Hal ini dapat di lihat pada penjelasan tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1. Jumlah Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2013-2023

Tahun	Jumlah Kemiskinan (%)
2013	10.54
2014	10.03
2015	10.36

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	9.73
2017	9.66
2018	8.88
2019	8.41
2020	9.52
2021	10.03
2022	9.82
2023	9.16

Sumber: BPS Kota Cirebon dan Open Data Kota Cirebon

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan rata-rata persentase kemiskinan selama periode 2013 hingga 2023 tercatat sebesar 9,65%, menunjukkan angka yang relatif stabil. Pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 10,54%. Peningkatan ini sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terganggunya berbagai sektor ekonomi, penurunan lapangan pekerjaan, serta meningkatnya ketidakpastian sosial dan ekonomi.

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Upah minimum dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan jika efektif karena dapat membantu orang miskin keluar dari kemiskinan dalam perkembangan selanjutnya. Saat ini, upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perdebatan terkait dengan dampak upah minimum terhadap kemiskinan masih menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Pendukung peraturan terkait upah minimum dapat meningkatkan kondisi ekonomi pekerja dengan upah rendah, sehingga upah minimum berkontribusi pada pengurangan kemiskinan pekerja yang terkena dampak peraturan ini (P. K. Dewi et al., 2017).

Kemiskinan merupakan persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan meningkatnya jumlah penduduk. Ini juga mempengaruhi daya

saing dalam berbagai sektor kebutuhan, terutama untuk mendapatkan pekerjaan (Sari et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Upah Minimum sebagai batas minimum yang harus diikuti oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk membayar pekerjanya. Menurut Pasal 1 Permenakertrans Nomor 7 tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai kompensasi atau gaji yang diberikan oleh perusahaan tidak kurang dari biaya kebutuhan hidup minimal para pekerja dan supaya mereka dapat memperoleh upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka (Radityana et al., 2023).

Upah Minimum di Indonesia ditetapkan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Upah Minimum Kabupaten (UMK) biasanya ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum yang berlaku pada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pemerintahan. (D Lestari, et al 2022). Upah Minimum Kota (UMK) Cirebon ditetapkan setiap tahun berdasarkan inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi lokal. UMK adalah indikator penting yang menetapkan standar upah bagi pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka. UMK meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang, melindungi hak-hak buruh, dan membantu perusahaan dalam menentukan gaji. Dengan kebijakan ini, kehidupan para pekerja akan menjadi lebih baik dan industri akan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ekonomi. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah yakni melalui peningkatan pendapatan/gaji (Sutikno et al., 2019). Upah Minimum Kota yang ada dan ditetapkan pada proses pembagian upah atau gaji pekerja di Instansi Pemerintah ataupun swasta mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada penjelasan tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. 2. Data upah minimum dari tahun 2013-2023

Tahun	Upah Minimum (Rp)
2013	1.082.500
2014	1.266.500
2015	1.415.000
2016	1.608.945
2017	1.741.682.96
2018	1.893.383.54
2019	2.045.422.24
2020	2.219.487.67
2021	2.271.201.73
2022	2.304.943.51
2023	2.456.516.60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Pada tabel 1.2 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kota Cirebon dari tahun 2013 hingga 2023. Dalam tabel ini, dapat dilihat bahwa UMK mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, Pada tahun 2013, besaran UMK tercatat sebesar Rp.1.082.500, pada tahun 2014, UMK meningkat menjadi Rp.1.266.500, menunjukkan adanya kenaikan sekitar Rp.184.000, pada tahun 2015, besaran UMK kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.1.415.000, ada 2016, UMK kembali meningkat menjadi Rp.1.608.945, tahun 2017, besaran UMK tercatat Rp 1.741.682,96, pada tahun 2019, UMK mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi Rp.2.045.422,24, ada tahun 2021, UMK menurun sedikit menjadi Rp.2.207.201,73 dari Rp.2.271.201,72 pada tahun 2020, mengalami penurunan sekitar Rp.64.000,ada tahun 2022, UMK kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.2.304.943,51, ada tahun 2023, besaran UMK tercatat Rp.2.456.516,60.

Upah minimum dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi, keduanya memiliki hubungan yang erat. Perbaikan kondisi ekonomi suatu negara dalam jangka panjang yang ditunjukkan oleh peningkatan kapasitas produksi dan daya beli warganya disebut pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu negara yaitu salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, yang didefinisikan sebagai proses kenaikan output per kapita yang konsisten dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah tanda pertumbuhan ekonomi suatu negara

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan dalam investasi, produktivitas, dan konsumsi biasanya menunjukkan peningkatan output perkapita, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, jika distribusi pendapatan tidak merata, peningkatan ekonomi tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, Sugirno 1996: 33 dalam (Romi & Umiyati, 2018) menyatakan bahwa distribusi pendapatan adalah ukuran yang berbeda yang harus diperhatikan selama proses pembangunan.

Keberhasilan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menunjukkan keberhasilan pembangunannya, setiap negara selalu menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan pembangunan wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan adalah syarat utama untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diikuti oleh peningkatan produksi barang dan jasa secara bertahap. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa cepat kegiatan ekonomi dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan kemakmuran sosial. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten menunjukkan bahwa ekonomi negara atau wilayah itu sendiri mengalami perkembangan yang positif (Romi & Umiyati, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mempengaruhi pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya kemiskinan. Sebagaimana pada penelitian (Resti et al., 2023) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sebab peningkatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan adanya banyak tercipta lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, sehingga tingkat kemiskinan berkurang. Artinya, pertumbuhan ekonomi wajib diperhatikan di berbagai daerah dimana penduduk miskin bekerja. Dari tingkat pengangguran akan menunjukkan apakah ekonomi suatu negara atau daerah berkembang, lambat, atau menurun. Tingkat pengangguran juga akan menunjukkan ketidaksamaan dan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan yang didapatkan negara atau daerah. (Imanto et al., 2020).

Perekonomian Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,01 persen pada hampir semua sektor usaha selama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut kepala BPS Kota Cirebon, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kota dengan 28,28 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan dinamika positif dalam sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di Kota Cirebon. Dapat di lihat pada tabel 1.3 data laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon 2013-2023 berikut:

Tabel 1. 3. Data Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon 2013-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2013	5.63
2014	5.71
2015	5.81
2016	6.09
2017	5.8
2018	6.2
2019	6.29
2020	-0.98
2021	3.05
2022	5.1
2023	5.01

Sumber: Open data Kota Cirebon

Pada tabel 1.3 dapat disimpulkan sejak 2013 hingga 2019, Kota Cirebon mengalami peningkatan stabil dalam laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pada 2020, terjadi penurunan signifikan hingga -0,98%. Pemulihan terjadi pada 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,05%. Antara 2022 dan 2023, pertumbuhan kembali positif, mencapai 5,1% dan 5,01%.

Pengangguran menjadi salah satu penghalang utama pertumbuhan ekonomi. Karena berkembangnya sektor-sektor ekonomi akan menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya dikaitkan dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Dalam skala mikro maupun makroekonomi, pengangguran adalah masalah yang

berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak orang tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan Mankiw, 2012 dalam (Ardian et al., 2022).

Pengangguran adalah masalah yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia dalam skala makroekonomi. Dalam perdebatan politik, para birokrat sering berbicara tentang pengangguran dan berpikir tentang bagaimana kebijakan mereka dapat mengatasi kekurangan lapangan pekerjaan. Mankiw, 2012 dalam (Ardian et al., 2022). Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah tingkat pengangguran yang tinggi, yang meningkat lebih dari 5% setiap tahun. Tingkat pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya permintaan pekerjaan atau lapangan kerja yang tidak sesuai dengan mereka yang mencari pekerjaan, seperti banyaknya perusahaan yang membutuhkan sarjana atau diploma. Akibatnya, setiap orang bertanggung jawab atas pengangguran, dan pemerintah Indonesia harus menemukan cara untuk mengurangi tingkat pengangguran (Ardian et al., 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (2011), pengangguran terbuka mencakup sebagian dari angkatan kerja yang menganggur atau tengah mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulainya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka adalah cara untuk mengetahui berapa banyak orang yang tidak bekerja. Pantjar Simatupang wijayanto, 2010 dalam (Ardian et al., 2022).

Tabel 1. 4. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cirebon Tahun 2013-2023

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013	8.851
2014	9.676
2015	97.23
2016	10.43

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017	9.29
2018	9.07
2019	9.04
2020	10.97
2021	10.53
2022	8.42
2023	7.66

Sumber: Open Data Kota Cirebon

Pada tabel 1.4 bisa disimpulkan bahwa Tingkat pengangguran di Kota Cirebon masih relatif tinggi di 10,53% pada 2021, meskipun sudah ada penurunan. Pada 2022, penurunan menjadi 8,42%, dan pada 2023, penurunan lebih lanjut menjadi 7,66%, menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih baik setelah pandemi. Pada tahun 2013–2019: Meskipun data pengangguran untuk tahun-tahun awal tidak tersedia, tingkat pengangguran tercatat stabil di sekitar 9% dari 2017 hingga 2019.

Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan memiliki kaitan yang erat, karena keduanya saling mempengaruhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kristanto (2014), tingkat pengangguran yang tinggi sering kali berkontribusi pada rendahnya pemasukan bagi individu, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan. Artinya, apabila seseorang tidak menganggur dan memiliki sumber pendapatan yang stabil, mereka dapat menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ketika kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi dengan baik, individu tersebut tidak akan lagi tergolong dalam kategori miskin. Selain itu, dengan berkurangnya pengangguran, lebih banyak orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurunkan angka pengangguran akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, dan sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan merata (Hanifah et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hanifah et al.,

2021). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum yang meningkat setiap tahun dapat menawarkan gaji yang diberikan melalui suatu instansi kepada personelnnya sehingga karyawan memiliki gaji/penghasilan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi secara berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Menurut peneliti, pertumbuhan ekonomi ialah indikator buat membuktikan kesuksesan pembangunan yaitu *necessary condition* buat penurunan tingkat kemiskinan. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan akibat pengangguran dikuasai bagi pengangguran yang terlatih, orang yang menganggur masih bisa mencukupi keperluannya akibat tidak seluruh orang tak bekerja senantiasa miskin. Pada penelitian (Ashari et al., 2023). penelitian ini menyatakan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan research gap diatas, maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan memilih judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kemiskinan Di Kota Cirebon Tahun 2013-2023”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tingkat upah yang rendah menjadi satu dari berbagai aspek yang dapat menyebabkan kemiskinan. Karena tingkat upah rendah apalagi dibawah upah minimum menjadikan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) yang akan membangun berbagai peluang ekonomi dan kesempatan kerja sehingga menambah kesejahteraan masyarakat..

- c. Tingkatan pengangguran yang besar menimbulkan rendahnya pemasukan yang berikutnya memicu timbulnya kemiskinan. Apabila warga tidak menganggur serta mempunyai pemasukan, pendapatan tersebut bisa digunakan buat memenuhi pengeluaran keperluan mereka buat hidup.
- d. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup.

2. Batasan Masalah

Pada pembahasan penelitian ini. Peneliti memberikan batasan masalah dengan tujuan supaya masalah yang diteliti tidak meluas kemana-mana. Selain itu agar peneliti ini bisa selesai sesuai dengan tujuan dan terarah. Sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya batasan masalah ini hanya fokus pada:

- a. Penelitian ini hanya akan mencakup data dan analisis dari tahun 2013 hingga 2023.
- b. Fokus penelitian terbatas pada Kota Cirebon sebagai objek penelitian.
- c. Kemiskinan yang menjadi fokus dalam penelitian ini akan diukur berdasarkan indikator-indikator tertentu, seperti upah minimum, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka serta tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023?
- c. Bagaimana pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023?
- d. Bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023.
- d. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon tahun 2013-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa di gunakan dan bermanfaat khusus nya menganangani tingkat kemiskinan khususnya pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat tentang pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penelitian Akademis

Manfaat dari penelitian adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai tentang pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon.

b. Bagi Pemerintah Kota Cirebon

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Cirebon agar bisa memahami penyebab atau permasalahan yang ada di masyarakat Kota Cirebon terutama soal kemiskinan, agar pemerintah Kota Cirebon bisa melakukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang di Kota Cirebon.

c. Bagi Masyarakat Dan Pembaca

Dalam penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan dan informasi serta referensi bagi peneliti lain maupun pembaca mengenai pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Kota Cirebon.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan isi penelitian skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian pustaka yang melandasi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, operasional variabel, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian skripsi, objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran yang diberikan mengenai penelitian ini.

UNINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON